



JOURNAL OF CONTEMPORARY
GENDER AND CHILD STUDIES

Vol 5 No 2 Year 2026 Page 874-887

<https://zia-research.com/index.php/jcgscs>

**Pesantren Ramah Anak Sebagai Pusat Edukasi Anti Feodalisme:
Studi Kasus di Pondok Pesantren Al-Qodiri 1 Jember**

Merita Gustiana¹, Syaiful Rizal²

^{1,2} Universitas Islam KH. Achmad Muzzaki Syah, Jember, Indonesia

Email: meritagustiana@gmail.com¹, syaifulrizaljember16@gmail.com²

ARTICLE INFO

Kata Kunci

Anti Feodalisme
Disiplin Tanpa Kekerasan
Kepemimpinan Humanis
Partisipasi Santri
Pesantren Ramah Anak

ABSTRACT

This study aims to describe the implementation of a child-friendly pesantren and to analyze its contribution to fostering an egalitarian culture free from feudal practices at Pondok Pesantren Al-Qodiri 1 Jember. This research employs a descriptive qualitative approach, with research subjects consisting of pesantren administrators, namely Ustadzah Ita Yuli Indriyani, S.Pd., Siti Jamilah Khoirun Nisa as a regional administrator, and Rosmiatul Himmah as the head of the dormitory. Data collection techniques include interviews, observations, and documentation, while data analysis is conducted through data reduction, data display, and conclusion drawing, with validity testing using triangulation. The results of the study indicate that the implementation of a child-friendly pesantren is realized through official recognition by the state via the Decree of the Minister of Religious Affairs Number 91 of 2025, exemplary leadership (uswah), a structured yet non-dominative leadership system, the application of non-violent and educational discipline through rules and corrective sanctions, and the active involvement of students as agents in promoting a safe environment. These findings demonstrate that such practices can transform pesantren culture into a more humanistic, dialogical, and egalitarian one, thereby functioning as a center for anti-feudalism education in the daily lives of the students.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi pesantren ramah anak serta menganalisis kontribusinya dalam membentuk budaya yang egaliter dan bebas dari praktik feodalisme di Pondok Pesantren Al-Qodiri 1 Jember. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan subjek penelitian meliputi pengurus pesantren, yaitu Ustadzah Ita Yuli Indriyani, S.Pd., Siti Jamilah Khoirun Nisa sebagai pengurus daerah, dan Rosmiatul Himmah sebagai ketua kamar. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan uji keabsahan menggunakan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pesantren ramah anak diwujudkan melalui pengakuan resmi negara oleh Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 91 Tahun 2025, keteladanan (uswah) dalam kepemimpinan, sistem kepemimpinan yang terstruktur namun tidak dominatif, penerapan disiplin tanpa kekerasan yang bersifat edukatif melalui tata tertib dan sanksi pembinaan, serta keterlibatan aktif santri sebagai agen pelopor lingkungan aman. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik tersebut mampu mentransformasikan budaya pesantren menjadi lebih humanis, dialogis, dan egaliter, sehingga berfungsi sebagai pusat edukasi anti feodalisme dalam kehidupan santri sehari-hari.

PENDAHULUAN

Pendidikan di lingkungan pesantren memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, akhlak, serta relasi sosial santri (Laisaan & Husni 2026, 291). Pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga transmisi ilmu keagamaan, tetapi juga sebagai ruang pembentukan nilai-nilai sosial yang membentuk pola interaksi antarindividu (Trisnani et al., 2026). Dalam konteks ini, relasi antara santri, pengurus, dan pengasuh menjadi bagian penting dalam proses pendidikan yang berlangsung secara simultan dalam kehidupan sehari-hari. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan kecenderungan budaya senioritas dan relasi kuasa yang bersifat hierarkis di beberapa pesantren. Pola ini seringkali menempatkan

santri senior sebagai pihak yang memiliki otoritas lebih tinggi dibandingkan santri junior, sehingga interaksi yang terbangun cenderung bersifat satu arah dan kurang dialogis (Rahmah 2026, 338-339).

Kondisi tersebut berpotensi melahirkan praktik kekerasan simbolik maupun verbal, seperti penggunaan bahasa yang keras, tekanan psikologis, serta pembatasan ruang partisipasi bagi santri yang berada pada posisi lebih rendah (Triana et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua praktik pendidikan di pesantren sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai humanisme. Fenomena tersebut mengindikasikan adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan transformasi sistem pendidikan pesantren menuju pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada perlindungan anak. Sahrowi et al., (2025) menjelaskan bahwa pendidikan yang humanis menempatkan santri sebagai subjek yang memiliki hak, martabat, dan ruang untuk berkembang secara optimal.

Sejalan dengan kebutuhan tersebut, Kementerian Agama Republik Indonesia menerbitkan kebijakan melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 91 Tahun 2025 tentang peta jalan pengembangan pesantren ramah anak (Kementerian Agama RI, 2025: 3). Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak serta perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan di lingkungan pesantren. Kebijakan tersebut menekankan pentingnya penguatan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penyediaan sistem yang mendukung terciptanya lingkungan pendidikan yang aman, sehat, dan inklusif (Kementerian Agama RI, 2025: 3). Dengan demikian, pesantren diharapkan mampu beradaptasi dengan prinsip-prinsip perlindungan anak tanpa kehilangan identitas keislamannya. Konsep pesantren ramah anak menjadi salah satu alternatif solusi dalam menjawab permasalahan tersebut. Pendekatan ini menekankan pada pengasuhan berbasis kasih sayang, komunikasi yang dialogis, serta penghapusan praktik kekerasan dalam proses pendidikan.

Implementasi kebijakan pesantren ramah anak tidak hanya berkaitan dengan aturan dan aspek administratif, tetapi juga menyentuh perubahan dalam budaya pendidikan yang berlangsung sehari-hari di lingkungan pesantren. Sebagai lembaga yang memiliki tradisi kuat dalam pembentukan karakter, pesantren tetap perlu menjaga nilai-nilai seperti penghormatan, kedisiplinan, dan kepatuhan, namun pada saat yang sama juga harus sejalan dengan prinsip perlindungan anak, kesetaraan, dan komunikasi yang lebih edukatif. Karena itu, kajian tentang pesantren ramah anak tidak cukup hanya berhenti pada kebijakan atau sistem yang tertulis, tetapi juga perlu melihat bagaimana kebijakan tersebut benar-benar dijalankan dalam kehidupan sosial di pesantren, terutama dalam membentuk pola interaksi yang lebih sehat, dialogis, dan tidak didominasi oleh relasi senior dan junior yang terlalu kaku.

Kajian tentang pesantren ramah anak juga telah diteliti oleh beberapa peneliti sebelumnya. Penelitian Nadlifuddin (2024) menunjukkan bahwa implementasi pesantren ramah anak dilakukan melalui penyusunan sistem perlindungan anak, penyediaan mekanisme pengaduan yang aman, serta integrasi pendidikan hak anak dalam pembelajaran. Hasil penelitian tersebut menegaskan bahwa pendekatan ini mampu menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan humanis. Namun demikian, penelitian tersebut belum secara eksplisit mengkaji hubungan antara pesantren ramah anak dengan upaya mengurangi budaya feodalisme dalam relasi sosial santri. Hal ini menunjukkan adanya ruang kajian yang masih terbuka untuk diteliti lebih lanjut.

Penelitian lain oleh Nurhamidah et al. (2025) menyoroti implementasi kebijakan pesantren ramah anak dari aspek kelembagaan, seperti komitmen pimpinan, keberadaan SOP, serta pelatihan pengasuh. Penelitian ini juga mengidentifikasi adanya hambatan kultural dan struktural dalam penerapannya. Meskipun demikian, penelitian tersebut belum mengkaji secara mendalam bagaimana kebijakan tersebut berdampak pada perubahan pola relasi sosial antar santri, khususnya dalam konteks relasi kuasa dan senioritas.

Sementara itu, Wasid et al. (2025) menegaskan bahwa pesantren memiliki peran penting dalam pembentukan karakter melalui relasi sosial sehari-hari. Struktur kepemimpinan santri dapat menjadi media pembelajaran apabila dijalankan dengan prinsip pembinaan, bukan dominasi. Hal ini menunjukkan bahwa struktur organisasi di pesantren memiliki potensi besar dalam membentuk budaya sosial, tergantung pada bagaimana sistem tersebut dijalankan. Jika digunakan secara tepat, struktur tersebut dapat menjadi sarana pendidikan yang efektif. Penelitian Farichah dan Hasibullah (2025) juga menegaskan pentingnya kompetensi pendidik dalam membangun relasi edukatif yang humanis. Pendidik dituntut memiliki keteladanan, tanggung jawab, serta kemampuan pedagogis yang baik dalam membina santri. Dari berbagai penelitian tersebut, terlihat bahwa kajian tentang pesantren ramah anak telah berkembang, namun masih

terdapat celah penelitian yang belum banyak disentuh, khususnya terkait dengan aspek anti feodalisme dalam relasi sosial santri.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya menghubungkan konsep pesantren ramah anak dengan pendidikan anti feodalisme, yaitu bagaimana pendekatan ramah anak dapat digunakan untuk membangun relasi yang lebih setara, dialogis, dan bebas dari dominasi. Dalam konteks ini, Pondok Pesantren Al-Qodiri 1 Jember menjadi lokasi yang relevan untuk dikaji karena telah ditetapkan sebagai pesantren percontohan ramah anak berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 91 Tahun 2025 (Kementerian Agama RI, 2025: 3). Pesantren ini menunjukkan berbagai praktik implementatif, seperti keteladanan dalam kepemimpinan, struktur organisasi yang tidak menindas, disiplin tanpa kekerasan yang bersifat edukatif, serta pelibatan aktif santri sebagai agen lingkungan aman. Praktik tersebut mengindikasikan adanya transformasi dari pola relasi hierarkis menuju pola yang lebih egaliter (Kementerian Agama RI, 2025: 11).

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan penelitian ini terletak pada bagaimana implementasi pesantren ramah anak di Pondok Pesantren Al-Qodiri 1 Jember serta bagaimana kontribusinya dalam membentuk budaya edukasi anti feodalisme. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses implementasi tersebut, dengan harapan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan pendidikan pesantren yang humanis dan bebas dari praktik feodalisme.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, karena metode ini mampu memahami fenomena sosial secara mendalam dalam konteks alamiah, khususnya terkait implementasi pesantren ramah anak dan transformasi budaya sosial di lingkungan pesantren. Pendekatan deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai praktik pendidikan ramah anak sebagai upaya edukasi anti feodalisme. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian secara intensif terhadap suatu fenomena dalam batasan tertentu (Ilhami et al, 2024: 465). Dalam hal ini, fokus penelitian diarahkan pada implementasi pesantren ramah anak di Pondok Pesantren Al-Qodiri 1 Jember. Penelitian ini dilaksanakan di lokasi tersebut dengan pertimbangan bahwa pesantren ini telah ditetapkan sebagai pesantren percontohan ramah anak oleh Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 91 Tahun 2025, sehingga relevan untuk mengkaji praktik nyata pendidikan ramah anak dan transformasi sosial di lingkungan pesantren (Kementerian Agama RI, 2025). Waktu pelaksanaan penelitian, khususnya kegiatan wawancara, dilakukan pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 10.30 WIB.

Target penelitian ini yaitu sistem implementasi pesantren ramah anak yang berkontribusi terhadap pembentukan budaya anti feodalisme di lingkungan pesantren. Subjek penelitian meliputi pihak-pihak yang terlibat langsung dalam sistem sosial dan kepemimpinan pesantren, yaitu Ustadzah Ita Yuli Indriyani, S.Pd. sebagai pengurus pesantren, Siti Jamilah Khoirun Nisa sebagai pengurus daerah (pengdar), Rosmiatul Himmah sebagai ketua kamar, Indah Ayu Lestari sebagai seksi keamanan, serta santri sebagai anggota. Pemilihan informan dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan keterlibatan aktif dan pemahaman mereka terhadap implementasi nilai-nilai pesantren ramah anak.

Prosedur penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan analisis data. Pada tahap persiapan, peneliti melakukan studi pendahuluan dan menyusun instrumen penelitian. Tahap pelaksanaan dilakukan dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan tahap analisis dilakukan secara berkelanjutan sejak awal pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan observasi terhadap informan, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen seperti struktur organisasi, tata tertib pesantren, serta program-program pesantren ramah anak. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (human instrument) yang didukung oleh pedoman wawancara, lembar observasi, dan dokumentasi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung aktivitas santri dan pola interaksi sosial di lingkungan pesantren, wawancara dilakukan secara mendalam untuk menggali informasi terkait implementasi pesantren ramah anak dan nilai-nilai anti feodalisme, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa arsip, foto kegiatan, serta dokumen resmi pesantren. Analisis data menggunakan model

interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis dilakukan secara terus-menerus hingga diperoleh pemahaman yang mendalam. Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu dengan membandingkan data dari berbagai informan serta membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, sehingga data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengakuan Negara terhadap Pesantren Ramah Anak Sebagai Legitimasi Edukasi Anti Feodalisme

Pengakuan resmi dari pemerintah menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat pelaksanaan pesantren ramah anak di Pondok Pesantren Al-Qodiri 1 Jember. Hal ini ditandai dengan adanya penetapan melalui Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2025 yang menetapkan pesantren tersebut sebagai salah satu pesantren percontohan ramah anak (Pondok Pesantren Al-Qodiri 1 Jember, 2025). Penetapan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menunjukkan bahwa pesantren telah berupaya memenuhi berbagai indikator perlindungan anak, seperti kebijakan pencegahan kekerasan, mekanisme pelaporan, serta pendekatan pendidikan yang lebih mengedepankan kasih sayang dalam proses pembinaan santri.

Hasil wawancara dengan salah satu pengurus yaitu Ustadzah Ita Yuli Indriyani, S.Pd., menunjukkan bahwa pengakuan tersebut dipandang sebagai amanah sekaligus dorongan untuk terus menjaga sistem pendidikan yang humanis. Beliau menyampaikan bahwa setelah adanya penetapan tersebut, terdapat peningkatan kesadaran dari seluruh elemen pesantren untuk menghindari praktik kekerasan dan memperkuat pendekatan pembinaan yang ramah anak. Hal ini juga diperkuat oleh hasil observasi yang menunjukkan adanya interaksi yang lebih santun, tidak ditemukan praktik senioritas yang menekan, serta adanya upaya menjaga komunikasi yang dialogis antara pengurus dan santri.

Temuan ini menunjukkan bahwa pengakuan negara berfungsi sebagai legitimasi yang memperkuat transformasi budaya pesantren dari pola relasi yang bersifat feodal menuju pola yang lebih egaliter. Secara teoretis, legitimasi institusional memiliki peran dalam membentuk perilaku sosial melalui peneguhan norma dan standar tertentu dalam suatu lembaga. Dalam konteks ini, kebijakan pesantren ramah anak mendorong terbentuknya sistem pendidikan yang menghargai hak anak dan menolak praktik dominasi (Kementerian Agama RI, 2025: 3). Dengan adanya legitimasi tersebut, pesantren tidak hanya menjalankan nilai-nilai keagamaan, tetapi juga mengintegrasikan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam praktik pendidikan sehari-hari.

Jika dikaitkan dengan konsep anti feodalisme, pengakuan negara ini menjadi titik awal dalam mendekonstruksi relasi kuasa yang sebelumnya cenderung hierarkis. Budaya feodalisme dalam pendidikan biasanya ditandai dengan dominasi pihak yang lebih tinggi terhadap yang lebih rendah, minimnya ruang partisipasi, serta adanya tekanan dalam interaksi sosial. Namun, dengan adanya kebijakan pesantren ramah anak, pola tersebut mulai bergeser menuju relasi yang lebih setara dan partisipatif.

Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Nadlifuddin (2024: 112) yang menyatakan bahwa implementasi pesantren ramah anak mampu menciptakan lingkungan yang inklusif dan humanis melalui sistem perlindungan anak yang terstruktur. Meskipun demikian, penelitian ini menunjukkan temuan lebih lanjut bahwa legitimasi negara tidak hanya berdampak pada aspek perlindungan anak, tetapi juga berkontribusi dalam perubahan budaya sosial yang lebih luas, yaitu pengurangan praktik feodalisme di lingkungan pesantren.

Dengan demikian, pengakuan resmi dari negara tidak hanya berfungsi sebagai simbol administratif, tetapi juga sebagai instrumen transformasi sosial yang mendorong terciptanya sistem pendidikan yang lebih adil, humanis, dan bebas dari praktik dominasi. Hal ini menunjukkan bahwa pesantren ramah anak dapat menjadi model pendidikan yang tidak hanya melindungi anak, tetapi juga membangun budaya sosial yang egaliter sebagai bagian dari edukasi anti feodalisme.



Gambar 1. Alur implementasi ramah anak di PP.Al-Qodiri 1 Jember

Gambar diatas merupakan alur implementasi pesantren ramah anak di Pondok Pesantren Al-Qodiri 1 Jember sebagai sistem yang terintegrasi. Tahap pertama dimulai dari legitimasi negara melalui penetapan sebagai pesantren ramah anak. Tahap kedua berupa keteladanan kepemimpinan (uswah) yang ditunjukkan oleh pengurus dalam interaksi sehari-hari. Tahap ketiga adalah pengelolaan struktur organisasi non dominatif yang berfungsi sebagai sistem pembinaan, bukan alat kekuasaan. Tahap keempat berupa penerapan disiplin tanpa kekerasan melalui pendekatan edukatif dan bimbingan konseling. Tahap kelima adalah pelibatan aktif santri sebagai agen lingkungan aman melalui musyawarah dan kotak saran.

Skema ini menunjukkan bahwa seluruh komponen saling terhubung dan berkontribusi dalam membentuk budaya pesantren yang humanis, partisipatif, dan anti feodal. Secara teoretis, integrasi sistem ini mencerminkan pendekatan pendidikan holistik yang menggabungkan aspek struktural, kultural, dan relasional dalam membentuk lingkungan belajar yang aman (Kementerian Agama RI, 2025: 4).

Keteladanan (Uswah) dalam Kepemimpinan Sebagai Basis Relasi Humanis

Keteladanan (uswah) menjadi pola utama dalam praktik kepemimpinan santri di Pondok Pesantren Al-Qodiri 1 Jember. Dalam kehidupan sehari-hari, ketua kamar dan pengurus tidak cenderung menggunakan pendekatan perintah yang bersifat keras, melainkan lebih menekankan pada pemberian contoh secara langsung. Hal ini terlihat dari kebiasaan mereka yang menjaga sikap santun dalam berkomunikasi, turut terlibat dalam berbagai kegiatan santri, serta membimbing anggota kamar dengan cara yang lebih ramah dan membangun. Dalam praktiknya, pendekatan keteladanan ini dirasakan lebih efektif dalam membangun kepatuhan dan kedekatan emosional antar santri dibandingkan instruksi yang bersifat instruktif semata. Beberapa pengurus dan ketua kamar juga menegaskan bahwa arahan akan lebih mudah diterima ketika disertai tindakan nyata yang bisa dicontoh oleh santri lainnya. Selain itu, keterlibatan pengurus dalam aktivitas bersama santri menunjukkan adanya pola kepemimpinan yang partisipatif dan tidak berjarak, sehingga hubungan yang terbentuk lebih bersifat kekeluargaan. Pola keteladanan ini menunjukkan bahwa kepemimpinan di lingkungan pesantren tidak hanya berfungsi sebagai struktur pengendali, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter melalui praktik langsung dalam keseharian. Berikut ringkasan hasil pengamatan terkait bentuk keteladanan dalam kepemimpinan santri:

Tabel 1. Bentuk Keteladann (*Uswah*) dalam Kepemimpinan Santri di Pesantren Al-Qodiri 1 Jember

No	Aspek Keteladanan	Bentuk Praktik	Dampak Terhadap Santri
1	Komunikasi	Menggunakan bahasa santun, tidak membentak.	Santri merasa dihargai, seluruh santri terbiasa berkomunikasi sopan dan terkontrol.
2	Keterlibatan	Pengurus ikut serta kegiatan bersama santri. Seperti contohnya: ketua kamar ikut serta dalam membersihkan kamar/ jadwal piket.	Terbangun kebersamaan.
3	Pembinaan	Memberi contoh sebelum memberi perintah. Contoh observasi yang saya temukan yaitu pengdar bangun awal terlebih dahulu untuk membangunkan seluruh ketua kamar, kemudian ketua kamar bangun dan kemudian membangunkan anggotanya.	Santri lebih mudah mengikuti.
4	Sikap	Menunjukkan kesabaran dan empati. Kalau ada santri melakukan kesalahan, sebagai pengurus tidak langsung membentak tapi ditanya dulu “kenapa bisa begitu?”, didengar, dan dibimbing.	Relasi menjadi lebih dekat. Sikap sabar dan empati dari pemimpin membuat hubungan dengan santri menjadi lebih akrab, terbuka, dan tidak menimbulkan rasa takut, sehingga interaksi yang terbangun lebih humanis.

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa keteladanan tidak hanya menjadi metode kepemimpinan, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pembentukan relasi sosial yang lebih humanis. Analisis data menunjukkan bahwa pendekatan ini mampu mengurangi jarak antara pemimpin dan anggota, sehingga tercipta interaksi yang lebih dialogis dan tidak menekan.

Secara teoretis, konsep keteladanan (*uswah*) merupakan prinsip fundamental dalam pendidikan Islam yang menempatkan pendidik sebagai figur yang memberi contoh nyata dalam perilaku sehari-hari. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa proses pendidikan tidak hanya terjadi melalui transfer pengetahuan, tetapi juga melalui internalisasi nilai melalui contoh konkret (Farichah & Hasibullah, 2025: 78). Keteladanan juga menjadi bagian penting dalam kompetensi kepribadian pendidik yang menuntut sikap moral, tanggung jawab, dan integritas dalam membina peserta didik.

Selain itu, dalam perspektif pendidikan humanistik, keteladanan merupakan bentuk pendekatan yang menghargai individu sebagai subjek yang aktif. Pendidikan humanistik menekankan pentingnya hubungan interpersonal yang positif, empati, serta penghargaan terhadap potensi individu (Sultani et al., 2023, 177-193). Dalam konteks ini, keteladanan menjadi sarana untuk membangun hubungan yang didasarkan pada kepercayaan dan penghormatan, bukan pada kekuasaan.

Jika dikaitkan dengan teori pembelajaran sosial, Warini et al. (2023: 566-576) menjelaskan bahwa individu belajar melalui proses observasi dan imitasi terhadap perilaku orang lain. Dalam lingkungan pesantren, santri cenderung meniru perilaku pengurus atau pemimpin yang mereka anggap sebagai figur teladan. Oleh karena itu, keteladanan memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk perilaku dan sikap santri.

Lebih lanjut, konsep kepemimpinan teladan juga sejalan dengan teori servant leadership yang menekankan bahwa pemimpin berperan sebagai pelayan bagi anggotanya. komarudin (2023: 1-11) menyatakan bahwa kepemimpinan yang efektif adalah kepemimpinan yang mengutamakan kebutuhan orang lain, membangun hubungan yang empatik, serta mendorong perkembangan individu secara optimal. Dalam praktiknya di pesantren, hal ini terlihat dari sikap pengurus yang tidak memposisikan diri sebagai penguasa, tetapi sebagai pembimbing yang mendampingi santri.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keteladanan mampu menjadi mekanisme efektif dalam mengubah pola relasi sosial dari yang bersifat feodal menuju relasi yang lebih humanis. Dalam budaya feodalisme, relasi dibangun atas dasar kekuasaan dan dominasi, sedangkan dalam pendekatan keteladanan, relasi dibangun melalui pengaruh moral dan kedekatan emosional.

Hasil penelitian ini juga memperkuat temuan Wasid, Hanisy, dan Rahman (2025: 134) yang menyatakan bahwa struktur kepemimpinan santri dapat menjadi media pembelajaran sosial apabila dijalankan dengan prinsip pembinaan dan keteladanan. Dengan demikian, kepemimpinan tidak lagi menjadi alat kontrol, tetapi menjadi sarana pendidikan karakter.

Dengan demikian, keteladanan (uswah) dalam kepemimpinan di Pondok Pesantren Al-Qodiri 1 Jember tidak hanya berfungsi sebagai metode pembinaan, tetapi juga sebagai basis dalam membangun relasi humanis yang egaliter (Hasibullah, 2026). Hal ini menunjukkan bahwa transformasi budaya anti feodalisme dapat dimulai dari perubahan cara memimpin, yaitu dari pola instruktif menuju pola keteladanan yang lebih mendidik dan memanusiakan.

Sistem Pembinaan Santri Berorientasi Pada Struktur Organisasi Non-Dominatif

Struktur organisasi santri di Pondok Pesantren Al-Qodiri 1 Jember berjalan secara tertata melalui pembagian peran seperti pengurus, pengdar (pengurus daerah), ketua kamar, hingga seksi keamanan. Namun dalam praktiknya, struktur tersebut tidak berfungsi sebagai sarana kekuasaan yang bersifat menekan, melainkan lebih diarahkan sebagai sistem pembinaan dan pengelolaan kehidupan santri sehari-hari. Dalam pelaksanaannya, setiap unsur organisasi lebih menekankan pada fungsi koordinasi, pendampingan, dan pelayanan terhadap santri. Hubungan yang terbangun antar pengurus dan anggota tidak bersifat kaku atau hierarkis secara absolut, tetapi lebih fleksibel dan terbuka terhadap komunikasi dua arah. Pengurus juga diposisikan sebagai pihak yang bertanggung jawab membimbing, bukan untuk bersikap otoriter atau semena-mena terhadap anggota. Pola ini menunjukkan bahwa struktur organisasi di lingkungan pesantren dapat berperan sebagai instrumen pendidikan yang membentuk kedisiplinan sekaligus menjaga relasi yang tetap humanis di antara santri.

Secara deskriptif, data penelitian menunjukkan bahwa fungsi struktur organisasi mengalami pergeseran dari pola dominatif menuju pola edukatif (Romzi et al., 2024: 3). Hal ini tampak dalam praktik musyawarah, pembagian tugas yang jelas, serta adanya ruang komunikasi antara pengurus dan anggota. Dokumentasi struktur organisasi juga menunjukkan adanya pembagian peran yang sistematis tanpa menonjolkan simbol kekuasaan yang berlebihan. Berikut tabel hasil analisis fungsi struktur organisasi dalam pembinaan santri di PP. Al-Qodiri 1 Jember:

Tabel 3. Fungsi Struktur Organisasi dalam Pembinaan Santri di Pesantren Al-Qodiri 1 Jember

No	Struktur Organisasi	Fungsi Utama	Dampak
1	Pengurus	Badan pelaksana pesantren yang strukturnya dipilih dengan cara melalui reformasi domokratis, musyawarah, dan ditunjuk serta disahkan oleh pengasuh.	Kegiatan berjalan tertib
2	Pengdar (Pengurus Daerah)	Badan pelaksana pengurus yang membina santri dalam satu wilayah yang dipilih dengan cara pengajuan diri dan pengajuan dari hasil musyawarah mufakat serta disahkan oleh pengasuh.	Relasi lebih dekat
3	Ketua Kamar	Badan pelaksana pengurus yang yang membina santri dalam satu kamar untuk memantau segala aktifitas santri (anggota). Dengan cara pengajuan diri dan pengajuan dari hasil musyawarah mufakat serta disahkan oleh pengasuh.	Terbangun kedekatan emosional
4	Seksi keamanan	Menjaga ketertiban	Lingkungan aman

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa struktur organisasi tidak berfungsi sebagai alat kontrol yang menekan, tetapi sebagai sistem pembinaan yang mendukung terciptanya lingkungan yang tertib dan kondusif. Analisis data menunjukkan bahwa keberadaan struktur ini justru memperkuat keteraturan sosial tanpa menghilangkan nilai-nilai kesetaraan.

Secara teoretis, struktur organisasi dalam lembaga pendidikan memiliki fungsi sebagai alat koordinasi dan pembagian peran untuk mencapai tujuan bersama (Kusmawan, 2025: 15-25). Namun, dalam perspektif pendidikan kritis, struktur yang terlalu hierarkis berpotensi melahirkan dominasi dan ketimpangan relasi kuasa (Fuadi, 2023: 89-115). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang mampu mengelola struktur organisasi secara lebih humanis dan partisipatif.

Dalam konteks ini, temuan penelitian menunjukkan bahwa struktur organisasi di pesantren telah mengalami proses transformasi menjadi lebih demokratis. Hal ini sejalan dengan teori kepemimpinan partisipatif yang menekankan keterlibatan anggota dalam proses pengambilan keputusan (Suwardy et al., 2024: 124-138). Musyawarah yang dilakukan dalam pengelolaan kegiatan santri menjadi indikator bahwa kekuasaan tidak terpusat, tetapi didistribusikan secara kolektif.

Selain itu, konsep distributed leadership juga relevan dalam menjelaskan temuan ini. Menurut Hendriani et al (2024: 171-184), kepemimpinan tidak hanya berada pada satu individu, tetapi tersebar dalam berbagai peran dalam organisasi. Dalam konteks pesantren, pengurus, pengdar, dan ketua kamar memiliki peran masing-masing dalam membina santri, sehingga tanggung jawab kepemimpinan menjadi lebih merata.

Temuan ini juga memperkuat pandangan Wasid et al., (2025: 140) yang menyatakan bahwa struktur kepemimpinan santri dapat menjadi sarana pendidikan sosial apabila dijalankan dengan prinsip pembinaan, bukan dominasi. Dengan demikian, struktur organisasi tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga edukatif.

Jika dikaitkan dengan konsep anti feodalisme, struktur organisasi non dominatif ini menjadi bukti bahwa hierarki tidak selalu identik dengan penindasan. Feodalisme dalam pendidikan ditandai dengan dominasi, ketimpangan, dan minimnya partisipasi. Namun, dalam temuan penelitian ini, struktur justru menjadi sarana untuk menciptakan keteraturan yang tetap menghargai kesetaraan.

Lebih lanjut, pendekatan ini juga sejalan dengan konsep pendidikan humanistik yang menekankan pentingnya hubungan yang setara dan saling menghargai dalam proses pendidikan. Struktur organisasi yang humanis memungkinkan santri untuk berkembang tidak hanya secara akademik, tetapi juga secara sosial dan emosional.

Dengan demikian, struktur organisasi di Pondok Pesantren Al-Qodiri 1 Jember tidak lagi dipahami sebagai simbol kekuasaan, melainkan sebagai sistem pembinaan yang edukatif, partisipatif, dan humanis. Temuan ini menunjukkan bahwa transformasi menuju budaya anti feodalisme dapat dilakukan melalui pengelolaan struktur organisasi yang tidak dominatif, sehingga tercipta relasi sosial yang lebih egaliter dalam kehidupan santri sehari-hari.

Penerapan Disiplin Tanpa Kekerasan melalui Pendekatan Edukatif dan Bimbingan Konseling

Penerapan disiplin di Pondok Pesantren Al-Qodiri 1 Jember tidak didasarkan pada pendekatan kekerasan, melainkan lebih menekankan pada aspek pembinaan yang bersifat edukatif. Setiap pelanggaran yang dilakukan santri tidak ditindak dengan hukuman fisik, tetapi diarahkan pada aktivitas yang memiliki nilai pendidikan dan perbaikan perilaku. Hal ini tampak dalam aturan tata tertib (ta'zir) yang berlaku, di mana bentuk sanksi lebih banyak berupa kegiatan yang mendidik, seperti membaca Al-Qur'an, menghafal, serta menjaga kebersihan lingkungan pesantren. Pendekatan ini menunjukkan bahwa disiplin dipahami sebagai sarana pembentukan karakter, bukan sebagai alat penghukuman. Dengan demikian, sistem disiplin yang diterapkan tidak hanya berfungsi menjaga ketertiban, tetapi juga menjadi bagian dari proses pendidikan yang menanamkan nilai tanggung jawab dan kesadaran diri pada santri. Dari hasil dokumentasi yang diperoleh, jenis pelanggaran dan bentuk sanksinya dapat dirangkum sebagai berikut:

Tabel 4. Bentuk Sanksi Edukatif dalam Sistem Disiplin Pesantren Al-Qodiri 1 Jember

No	Jenis Pelanggaran	Bentuk Sanksi	Durasi
1	Ringan	Berdiri dengan membaca Al-Qur'an bittartil (membaca burdah bagi yang haid)	15 menit
2	Sedang	Berdiri dengan membaca Al-Qur'an bittartil dan mengenakan atribut pelanggaran (membaca burdah bagi yang haid)	25 menit

3	Berat	Berdiri dengan membaca Al-Qur'an bittartil dan mengenakan atribut pelanggaran (membaca burdah bagi yang haid)	45 menit
4	Berulang	Sanksi berlipat + pembinaan lanjutan	
5	Pelanggaran Tertentu	Membersihkan lingkungan pondok	2-7 hari

Data tersebut menunjukkan bahwa sistem disiplin tidak diarahkan untuk menghukum, melainkan untuk membentuk kesadaran, tanggung jawab, serta kebiasaan positif pada santri. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan pengurus seksi keamanan pondok Al-Qodiri 1 Jember yaitu Indah Ayu Lestari, beliau menyatakan bahwa “hukuman di sini bukan untuk menyakiti, tapi untuk mendidik dan mengingatkan agar santri menjadi lebih baik.”

Secara analitis, temuan ini menunjukkan adanya transformasi paradigma disiplin dari pendekatan represif menuju pendekatan restoratif dan edukatif. Dalam perspektif pendidikan, disiplin yang efektif bukanlah yang menimbulkan rasa takut, melainkan yang membangun kesadaran internal (Teguh, 2025: 2106-2115). Sejalan dengan itu, pendekatan ini juga mencerminkan konsep positive discipline, yaitu metode pembinaan perilaku tanpa kekerasan yang menekankan pada penguatan karakter dan tanggung jawab (Ashari, 2024: 1-11).

Lebih lanjut, praktik ini juga relevan dengan teori bimbingan dan konseling perkembangan, yang menekankan bahwa peserta didik perlu dibimbing melalui proses pemahaman diri dan pengembangan perilaku positif (Sari & Fidyatin, 20225: 47-60). Dalam konteks pesantren, sanksi membaca Al-Qur'an atau kegiatan kebersihan tidak hanya berfungsi sebagai konsekuensi, tetapi juga sebagai media refleksi spiritual dan sosial.

Jika dikaitkan dengan konsep anti feodalisme, sistem disiplin ini menunjukkan bahwa kekuasaan tidak digunakan untuk menekan atau menghukum secara otoriter, tetapi sebagai sarana pembinaan yang humanis. Hal ini berbeda dengan pola feodal yang cenderung menggunakan hukuman sebagai alat kontrol kekuasaan. Di Pesantren Al-Qodiri 1 Jember, relasi antara pengurus dan santri lebih bersifat edukatif daripada dominatif.

Selain itu, pendekatan tanpa kekerasan ini juga sejalan dengan prinsip perlindungan anak yang menolak segala bentuk kekerasan fisik maupun psikis dalam pendidikan (Kementerian Agama RI, 2025: 5). Dengan demikian, disiplin yang diterapkan tidak hanya mendukung pembentukan karakter, tetapi juga menjaga kesehatan psikologis santri.



Gambar 2. Sanksi edukatif membersihkan lingkungan pesantren

Gambar dokumentasi diatas memperlihatkan beberapa santri sedang melaksanakan sanksi edukatif berupa kegiatan kebersihan lingkungan pesantren dengan menyapu halaman pondok. Sanksi tersebut diberikan kepada santri yang melanggar tata tertib, yaitu menggunakan pewarna bibir (lipstik) yang tidak sesuai dengan aturan pesantren. Bentuk pembinaan ini menunjukkan bahwa pelanggaran tidak direspons dengan hukuman fisik maupun tindakan yang bersifat merendahkan, tetapi diarahkan pada aktivitas positif yang bermanfaat bagi lingkungan. Melalui kegiatan kebersihan, santri dilatih untuk

memiliki rasa tanggung jawab, kedisiplinan, serta kepedulian sosial terhadap lingkungan pesantren. Dokumentasi ini memperlihatkan bahwa pendekatan disiplin di Pondok Pesantren Al-Qodiri 1 Jember lebih menekankan nilai edukatif dan pembentukan karakter dibandingkan pola hukuman yang represif.



Gambar 3. Sanksi edukatif membaca Al-Qur'an

Gambar ini menunjukkan beberapa santri menjalankan sanksi edukatif dengan membaca Al-Qur'an sebagai bentuk pembinaan atas pelanggaran tata tertib, yaitu rambut terlihat saat keluar dari lingkungan pesantren. Kegiatan membaca Al-Qur'an tersebut menjadi media pembinaan spiritual yang bertujuan menumbuhkan kesadaran diri serta memperkuat nilai kesopanan dan kedisiplinan dalam berpakaian sesuai aturan pesantren. Praktik ini menunjukkan bahwa sistem disiplin yang diterapkan tidak bertujuan mempermalukan santri, melainkan memberikan ruang refleksi dan perbaikan diri melalui pendekatan religius. Dokumentasi tersebut menegaskan bahwa penerapan disiplin di Pondok Pesantren Al-Qodiri 1 Jember dilakukan secara humanis, tanpa kekerasan, dan tetap berorientasi pada pendidikan karakter serta pembentukan kesadaran santri.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan disiplin tanpa kekerasan di Pondok Pesantren Al-Qodiri 1 Jember bukan sekadar kebijakan teknis, melainkan bagian dari sistem pendidikan yang berorientasi pada pembinaan, kesadaran, dan kemanusiaan. Praktik ini menjadi bukti nyata bahwa pendidikan pesantren mampu bertransformasi menjadi lebih humanis dan sekaligus menjadi media efektif dalam membangun budaya anti feodalisme di lingkungan santri.

Pelibatan Aktif Santri sebagai Agen Pencipta Lingkungan Aman dan Partisipatif melalui penghargaan terhadap pendapat dan kreasi santri

Santri di Pondok Pesantren Al-Qodiri 1 Jember diberi ruang yang cukup luas untuk menyampaikan pendapat, gagasan, maupun hasil kreasi mereka sebagai bagian dari upaya membangun lingkungan pesantren yang aman dan partisipatif (Ramadhan, 2025). Pelibatan tersebut tidak hanya berlangsung dalam forum formal seperti musyawarah kamar atau rapat pengurus, tetapi juga difasilitasi melalui saluran nonformal yang lebih terbuka. Salah satu bentuknya adalah keberadaan kotak saran yang ditempatkan di depan kantor pengdar. Media ini menjadi sarana bagi santri untuk menyampaikan aspirasi, kritik, maupun ide secara langsung tanpa harus melalui forum terbuka. Dengan adanya mekanisme ini, komunikasi antara santri dan pengurus menjadi lebih fleksibel dan memberikan kesempatan bagi santri untuk berpartisipasi dalam pengembangan lingkungan pesantren. Pola pelibatan ini menunjukkan adanya penghargaan terhadap suara santri, sekaligus memperkuat peran mereka sebagai bagian aktif dalam menciptakan lingkungan pesantren yang lebih inklusif dan partisipatif.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa keberadaan kotak saran ini dimaksudkan untuk menjangkau seluruh santri, termasuk mereka yang mungkin kurang percaya diri untuk berbicara di depan umum. Ustadzah Ita Yuli Indriyani, S.Pd selaku pengurus pondok pesantren Al-Qodiri 1 Jember menyampaikan bahwa "santri bisa menyampaikan apa saja lewat kotak saran, nanti akan dibaca dan ditindaklanjuti oleh pengurus." Hal ini juga diperkuat oleh hasil observasi yang menunjukkan bahwa pengurus secara rutin membuka dan menindaklanjuti isi kotak saran sebagai bahan evaluasi kegiatan dan kebijakan pesantren. Dengan demikian, setiap santri memiliki akses yang setara untuk menyampaikan pendapatnya.

Secara analitis, temuan ini menunjukkan bahwa pesantren telah menerapkan prinsip keterbukaan dan partisipasi dalam pengelolaan lingkungan pendidikan. Dalam perspektif pendidikan demokratis, penyediaan ruang bagi peserta didik untuk menyampaikan aspirasi merupakan bentuk pengakuan terhadap hak suara (*student voice*) yang penting dalam membangun budaya dialogis (Supatmi, 2024: 233-243). Selain itu, mekanisme kotak saran juga mencerminkan pendekatan inklusif, karena tidak semua peserta

didik memiliki keberanian yang sama dalam forum terbuka, sehingga diperlukan media alternatif yang lebih aman secara psikologis.

Lebih lanjut, pelibatan santri dalam menyampaikan pendapat dan kreasi ini sejalan dengan teori humanistik yang menekankan pentingnya penghargaan terhadap individu sebagai subjek yang memiliki potensi dan kebutuhan untuk diakui (Margawati, 2024: 290-299). Ketika pendapat santri dihargai, maka akan tumbuh rasa percaya diri, tanggung jawab, serta keterikatan terhadap lingkungan pesantren. Hal ini juga didukung oleh teori konstruktivisme sosial yang menyatakan bahwa pembelajaran dan pembentukan nilai terjadi melalui interaksi dan partisipasi aktif dalam lingkungan sosial (Aprianti et al, 2025: 135-147).

Jika dikaitkan dengan konsep anti feodalisme, keberadaan forum musyawarah dan kotak saran menunjukkan adanya distribusi ruang dialog yang lebih merata. Dalam sistem feodal, komunikasi cenderung bersifat satu arah dari atas ke bawah, sedangkan dalam praktik di Pesantren Al-Qodiri, santri diberikan ruang untuk menyampaikan suara mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini menunjukkan bahwa relasi kekuasaan tidak bersifat menekan, tetapi lebih terbuka dan dialogis. Reni et al., (2024: 5-11) menegaskan bahwa pendidikan yang membebaskan harus memberi ruang bagi peserta didik untuk berbicara dan didengar, bukan hanya menerima.

Selain itu, praktik ini juga selaras dengan prinsip perlindungan anak yang menekankan pentingnya partisipasi anak dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan lingkungan mereka (Kementerian Agama RI, 2025: 6). Dengan adanya kotak saran dan forum musyawarah, pesantren tidak hanya menciptakan lingkungan yang aman secara fisik, tetapi juga aman secara psikologis, karena santri merasa dihargai dan didengar.



Gambar 4. forum antara pengurus dan anggota

Gambar ini memperlihatkan suasana musyawarah santri, di mana anggota diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, usulan, dan evaluasi kegiatan. Tidak terlihat adanya dominasi dari pengurus, melainkan interaksi yang dialogis dan terbuka. Temuan ini menunjukkan bahwa pesantren telah menerapkan prinsip *student voice*, yaitu memberikan ruang bagi peserta didik untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan (Muzaki et al, 2024: 79). Dalam konteks anti-feodalisme, praktik ini menunjukkan adanya pergeseran dari komunikasi satu arah menuju komunikasi partisipatif yang lebih setara.



Gambar 5. kotak saran di depan kantor pengurus

Gambar ini menunjukkan keberadaan kotak saran yang ditempatkan di depan kantor pengurus sebagai media penyampaian aspirasi santri. Kotak saran ini menjadi alternatif bagi santri yang tidak menyampaikan pendapat secara langsung dalam forum. Secara analitis, keberadaan kotak saran mencerminkan pendekatan inklusif dalam partisipasi. Tidak semua santri memiliki keberanian berbicara di ruang publik, sehingga media ini memberikan rasa aman secara psikologis. Hal ini sejalan dengan konsep pendidikan humanistik yang menekankan pentingnya penghargaan terhadap individu (Margawati, 2024: 295). Selain itu, praktik ini juga menunjukkan bahwa pesantren tidak hanya menciptakan lingkungan aman secara fisik, tetapi juga aman secara psikologis. Dalam perspektif perlindungan anak, partisipasi merupakan salah satu indikator utama dalam menciptakan lingkungan ramah anak (Kementerian Agama RI, 2025: 6).

Dengan demikian, pelibatan aktif santri melalui penghargaan terhadap pendapat dan kreasi, baik melalui forum musyawarah maupun media kotak saran, menjadi indikator penting dalam keberhasilan implementasi pesantren ramah anak di Pondok Pesantren Al-Qodiri 1 Jember. Praktik ini memperkuat posisi santri sebagai agen lingkungan aman sekaligus mencerminkan budaya pendidikan yang partisipatif, inklusif, dan bebas dari praktik feodalisme.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di Pondok Pesantren Al-Qodiri 1 Jember, dapat disimpulkan bahwa implementasi pesantren ramah anak mampu berfungsi sebagai pusat edukasi anti feodalisme melalui lima aspek utama yang saling terintegrasi. Pertama, pengakuan resmi negara melalui Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2025 menjadi legitimasi kuat yang mendorong terbentuknya sistem pendidikan yang berorientasi pada perlindungan anak, sekaligus memperkuat transformasi budaya pesantren menuju relasi yang lebih egaliter. Kedua, keteladanan (uswah) dalam kepemimpinan menjadi dasar utama dalam membangun relasi humanis, di mana pengurus tidak mengedepankan perintah atau kekuasaan, melainkan memberi contoh nyata dalam sikap dan perilaku sehari-hari.

Ketiga, struktur organisasi yang non-dominatif menunjukkan bahwa keberadaan pengurus, pengdar, ketua kamar, dan seksi keamanan tidak dijalankan sebagai alat kekuasaan, tetapi sebagai sistem pembinaan yang partisipatif, sehingga mampu menciptakan hubungan sosial yang lebih setara dan dialogis. Keempat, penerapan disiplin tanpa kekerasan melalui pendekatan edukatif dan bimbingan konseling membuktikan adanya pergeseran paradigma dari hukuman represif menuju pembinaan yang konstruktif, yang berfokus pada pembentukan kesadaran dan tanggung jawab santri. Kelima, pelibatan aktif santri sebagai agen lingkungan aman, baik melalui forum musyawarah maupun media kotak saran, menunjukkan bahwa santri diberi ruang untuk berpartisipasi, menyampaikan pendapat, serta berkontribusi dalam menciptakan lingkungan pesantren yang aman dan inklusif.

Secara keseluruhan, kelima temuan tersebut menunjukkan bahwa pesantren ramah anak di Pondok Pesantren Al-Qodiri 1 Jember tidak hanya berperan dalam melindungi hak anak, tetapi juga mampu mentransformasikan budaya pesantren menjadi lebih humanis, partisipatif, dan bebas dari praktik feodalisme, sehingga dapat menjadi model pendidikan alternatif dalam membangun relasi sosial yang adil dan berkeadaban.

REFERENSI

- Aprianti, Y., Ramdani, I. L. A., Ali, M., Rifki, M., & Utomo, R. B. (2025). Perspektif Teori Konstruktivisme Vygotsky terhadap kemampuan bersosialisasi siswa slow learner di sekolah dasar inklusi. *DWIJA CENDEKIA: Jurnal Riset Pedagogik*, 9(1), 135-147. <https://doi.org/10.20961/jdc.v9i1.99167>
- Ashari, A. (2024). Alternatif Pendidikan Positif: Mendisiplinkan Siswa tanpa Menggunakan Kekerasan. *Journal of Education and Contemporary Linguistics*, 1(1), 1-11. <http://journal.alifba.id/index.php/jcl/article/view/14>
- Farichah, A., & Hasibullah, M. U. (2025). Unsur kompetensi guru dalam Kitab Ushul at-Tarbiyah wa Ta'lim sebagai dukungan terhadap kebijakan pendidikan nasional di pesantren. *Proceedings of the International Conference on Humanity Education and Society (ICHES)*, 4(1). <https://proceedingsiches.com/index.php/ojs/article/view/339>

- Fuady, S. (2023). Efektifitas Kepemimpinan Organisasi Struktural Kyai Dalam Pencapaian Keunggulan Kompetitif Pendidikan Pesantren (Studi Pada PPM Nurussalam–Sidogede). *Tarbiyatul Misbah (Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan)*, 16(1), 89-115. <https://doi.org/10.70688/tarbiyatulmisbah.v16i1.334>
- Hasibullah, M. U. (2026). Internalization of Social Tolerance Values Among Students at the Bahjatul Ulum Islamic Boarding School in Sukowono-Jember. *proceedings. icesy*, 1(01). <https://share.google/96JditXibh51fsHj3>
- Hendriani, S., Sari, R. Y., & Gistituati, N. (2024). Pengaruh gaya kepemimpinan terhadap efektivitas pengambilan keputusan. *Jurnal Niara*, 17(1), 171-184. <https://doi.org/10.31849/niara.v17i1.18972>
- Ilhami, M. W., Nurfajriani, W. V., Mahendra, A., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2024). Penerapan metode studi kasus dalam penelitian kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(9), 462-469. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11180129>
- Indriyani, I. Y. (2026). Wawancara pengurus Pondok Pesantren Al-Qodiri 1 Jember, 15 April 2026. Kementerian Agama Republik Indonesia. (2025). Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Program Pengembangan Pesantren Ramah Anak. Kementerian Agama RI. <https://blamakassar.web.id/media/informasi/file-684b746cb35d608442820250613.pdf>
- Komarudin, T. S. (2023). Melampaui ambisi pribadi: Mengubah kepemimpinan dalam pendidikan dari agenda yang didorong oleh ego. *Kaipi: Kumpulan Artikel Ilmiah Pendidikan Islam*, 1(1), 1-11. <https://doi.org/10.62070/kaipi.v1i1.4>
- Kusmawan, A. (2025). Manajemen Lembaga Pendidikan Berbasis Pondok Pesantren. *Jambura Journal of Educational Management*, 15-25. <https://doi.org/10.37411/jjem.v6i2.4506>
- Laisaan, R. A., & Husni, M. (2026). PEMBINAAN AKHLAK SANTRI DI PESANTREN: STRATEGI PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS NILAI ISLAM. *JURNAL ILMIAH RESEARCH STUDENT*, 3(1), 289-299. <https://doi.org/10.61722/jirs.v3i1.8591>
- Margawati, A. (2024). Implementasi pendekatan humanistik dalam proses pembelajaran di kelas 4 SDN Karangmojo II untuk membangun karakter dan potensi siswa melalui lingkungan belajar yang inklusif. *Elementary Journal: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 7(2), 290-299. <https://doi.org/10.47178/3s0p5p18>
- Muzaki, A. R., Wulandari, N. D., Nurcahyanti, F. W., & Idries, F. A. (2024). Gaya dan Model Kepemimpinan Pesantren dalam Meningkatkan Kualitas Santri: Gaya dan Model Kepemimpinan Pesantren dalam Meningkatkan Kualitas Santri. *Journal Financial, Business and Economics*, 1(2), 78-94. <https://doi.org/10.57176/jfine.v2i1.15>
- Nadlifuddin, M. I. (2024). Child-Friendly Pesantren Concept: A Strategic Approach to Empowering Children's Rights. *Santri: Journal of Pesantren and Fiqh Sosial*, 5(2), 169-184. <https://doi.org/10.35878/santri.v5i2.1395>
- Nurhamidah, O. P., Hazin, M., & Widiyanah, I. (2025). Implementasi Kebijakan Pesantren Ramah Anak dalam Perlindungan Anak. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 14(2 Mei), 3255-3266. <https://www.jurnaldidaktika.org/contents/article/view/2164>
- Pondok Pesantren Al-Qodiri 1 Jember. (2025). Ramah anak. <https://alqodiri.net/tag/ramahanak/>
- Radio Prosalina FM Jember. (2025). Kemenag RI tetapkan 2 pesantren di Jember sebagai percontohan ponpes ramah anak. <https://share.google/WAvttkxP9aj7uZjzq>
- Rahmah, E. (2026). DINAMIKA RELASI SENIOR DAN JUNIOR DALAM KEHIDUAPN SOSIAL DI PONDOK PESANTREN MAMBAUS SHOLIHIN PERSPEKTIF TEORI KONFLIK. *Jurnal Psikososial dan Pendidikan*, 2(1), 337-349. <https://publisherqu.com/index.php/psikosospenn/article/view/3835/3344>
- Ramadhan, R. (2025). Pemberdayaan Kreativitas Santri Melalui Pengelolaan Limbah Lingkungan. *Al Hanun: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 32-41. <https://doi.org/10.53515/alhanun.v1i1.4>
- Reni, S., Asbari, M., & Ramadhan, M. B. (2024). Pendidikan yang Membebaskan. *Journal of Information Systems and Management (JISMA)*, 3(4), 5-11. <https://doi.org/10.4444/jisma.v3i4.1056>
- Romzi, M., Ansori, A., Noviyanti, S. F., & kamil Salas, M. (2024). Struktur Dan Sistem Organisasi Pendidikan Islam Yang Dinamis. *Ma'arif Journal of Education, Madrasah Innovation and Aswaja Studies*, 3(1). <https://doi.org/10.69966/mjemias.v3i1.46>

- Sahrowi, A., Harianto, S., & Sayyi, A. (2025). Implementasi Pembelajaran Berbasis Humanistik Dalam Meningkatkan Spiritualitas Santri Di Pesantren Darul Ulum Banyuwangi Pamekasan. *Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 1(1), 14-24. <https://doi.org/10.32806/jspai.v1i1.912>
- Sari, S. F. J., & Fidyatin, I. N. (2025). Pendekatan Bimbingan dan Konseling Berbasis Kearifan Lokal Pesantren. *Nusantara of Research: Jurnal Hasil-hasil Penelitian Universitas Nusantara PGRI Kediri*, 12(1), 47-60. <https://doi.org/10.29407/nor.v12i1.25677>
- Sultani, S., Alfitri, A., & Noorhaidi, N. (2023). Teori Belajar Humanistik Dan Penerapannya Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *ANSIRU PAI: Pengembangan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam*, 7(1), 177-193. <http://dx.doi.org/10.30821/ansiru.v7i1.16108>
- Supatmi, S., Fatsena, R. A., & Santosa, R. B. (2024). PENJARINGAN ASPIRASI SISWA MELALUI MAJELIS PERWAKILAN KELAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM SEKOLAH YANG BERPIHAK PADA SISWA. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti*, 11(1), 233-243. <https://doi.org/10.38048/jipcb.v11i1.2401>
- Suwardy, D. C., Iskandar, I., & Bahri, S. (2024). Optimalisasi Peran Pimpinan Pesantren dalam Pengelolaan Organisasi Santri di Pesantren Terpadu Aceh. *ITQAN: Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan*, 15(2), 124-138. <https://doi.org/10.47766/itqan.v15i2.3195>
- Teguh, T., Rabbani, M. A., Al Ihsan, A. S., Saputra, M. I., Sugari, D., Permadi, M. A. M., & Sulisno, S. (2025). UPAYA GURU DALAM MENANAMKAN KEDISIPLINAN SANTRI DI PONDOK PESANTREN ISLAMIC CENTER BIN BAZ YOGYAKARTA. *Jurnal Kepemimpinan Dan Pengurusan Sekolah*, 10(4), 2106-2115. <https://doi.org/10.34125/jkps.v10i4.1111>
- Triana, W., Noor, H., Nasir, N. M., Jannah, A. N., Billahi, S., Rachmanda, G. S. P., ... & Dwikasari, C. (2025). *Menuju Pesantren Ramah Anak: Pemetaan Ketahanan dan Kerentanan Santri terhadap Kekerasan*. Penerbit A-Empat.
- Trisnani, E. E., Mariyam, S., & Maskuri, M. (2026). Tradisi Pesantren Relasinya dengan Kelembagaan Pendidikan Islam Multikultural. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 9(1), 976-987. <https://doi.org/10.54371/jiip.v9i1.10334>
- Tsauri, S., & Wahidah, F. (2021). Strategi kepemimpinan entrepreneurship kiai dalam eskalasi kemandirian santri melalui pendidikan terpadu di pesantren. *LEADERIA: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(2), 108-130. <https://share.google/mvwXxdLWb4iIvZJvP>
- Warini, S., Hidayat, Y. N., & Ilmi, D. (2023). Teori belajar sosial dalam pembelajaran. *ANTHOR: Education and Learning Journal*, 2(4), 566-576. <https://doi.org/10.31004/anthor.v2i4.181>
- Wasid, A., Hanisy, A., & Rahman, F. (2025, January). Pendidikan Karakter Berbasis Pesantren di Pondok Pesantren Darun Najah Patrang Jember. In *Proceedings Annual Conference on Moderate Islamic Studies* (Vol. 1, No. 1, pp. 11-19). <https://ancomis.unikhams.ac.id/index.php/files/article/view/6>